

## **KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM PRIORITAS DESA DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SINJAI**

Oleh:  
**Muhammad Takdir<sup>1</sup> & Jusniaty<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup> STISIP Muhammadiyah Sinjai

### **Abstrak**

Penelitian ini didasari oleh adanya program pembangunan prioritas oleh KEMENDES merupakan kepedulian pemerintah pusat terhadap pengelolaan potensi yang ada di desa. Hal ini akan terintegrasi apabila didukung dengan kemampuan kepala desa untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan potensi desa masing masing. Program pembangunan prioritas desa meliputi pengembangan produk unggulan desa sesuai dengan potensi desa, mendorong BUMDES untuk meningkatkan kapasitas manajemen sekaligus akses pasar, Pembangunan embung desa untuk mendorong produktivitas pertanian dan keempat adalah pembangunan sarana olah araga. Tujuan penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kemampuan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing yang telah didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD serta menyesuaikan program pembangunan yang diprioritaskan oleh kementerian pedesaan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif melihat fenomena secara langsung pada lokasi penelitian serta pengumpulan data baik data primer dan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini mengungkap permasalahan tentang rendahnya kemampuan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang prioritas, dilihat dari laporan realisasi pelaksanaan pembangun untuk desa di wilayah pesisir Kabupaten Sinjai, penggunaan anggaran untuk pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan sangat rendah di bandingkan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan di setiap desa.

**Kata kunci: kapasitas pemerintah; program prioritas desa.**

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Desa Mandiri merupakan sasaran utama visi pembangunan masyarakat, desa mandiri, adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Hal tersebut tertuang di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang unik dan kaya akan sumber daya alam, kekayaan laut mampu memberikan kehidupan kepada masyarakat. Akan tetapi, dibutuhkan kepedulian yang tinggi dari pemerintah dengan adanya program pembangunan prioritas oleh kemendes merupakan kepedulian pemerintah pusat terhadap pengelolaan potensi yang ada di desa. Hal ini akan terintegrasi apabila

**Oleh: Muhammad Takdir<sup>1</sup> & Jusniaty<sup>2</sup>**

didukung dengan kemampuan kepala desa untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan potensi desa masing masing. Kabupaten Sinjai memiliki wilayah pesisir yang terletak di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Pulau Sembilan.

Menurut Suparjan & Suyatno, (2003), salah satu kelemahan pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah tidak terintegrasinya berbagai program pembangunan di Indonesia. Beberapa program kebijakan yang didesain cenderung berjalan sendiri-sendiri dan terkesan parsial. Dengan demikian, menjadi tidak aneh jika program-program penanggulangan kemiskinan banyak tumpang tindih dan satu sama lain belum berkesinambungan. Bertitik tolak dari kegagalan pembangunan masa lalu, maka menjadi sangat urgen untuk mengimplementasikan konsep pembangunan masyarakat desa terpadu. Tujuan utama dari program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Program pembangunan prioritas desa meliputi pengembangan produk unggulan desa sesuai dengan potensi desa, mendorong Bumdes untuk meningkatkan kapasitas manajemen sekaligus akses pasar, pembangunan embung desa untuk mendorong produktivitas pertanian dan keempat adalah pembangunan sarana olahraga.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, dituntut keterlibatan sosiokultural yang ada dalam masyarakat. Hal ini semakin membuka peluang bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan nilai-nilai budaya serta pranata sosial setempat demi mewujudkan keberhasilan pembangunan di desanya masing-masing. Melalui otonomi desa. Alasan penulis mengangkat judul tentang kapasitas pemerintah desa untuk mewujudkan program prioritas desa di wilayah pesisir kabupaten sinjai, karena berdasarkan observasi awal diketahui bahwa pemerintah desa belum mampu mengelola secara optimal sumber daya yang dimiliki di desanya khususnya di wilayah pesisir, meskipun telah didukung dengan alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara, hal tersebut disebabkan karena kelemahan-kelemahan dalam melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa sehingga program prioritas yang ditekankan oleh kementerian desa belum terwujud.

Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana kemampuan kepala desa dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Sinjai; 2) Apa yang menjadi faktor determinan dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Kapasitas adalah sebuah konsep yang sangat teknokratis, dan sudah lama dikenal dalam manajemen pemerintahan di dalamnya mengandung esensi keahlian keterampilan, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, kinerja dan seterusnya. Kapasitas sering dimengerti sebagai kemampuan

seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien (GTZ dan USAID dalam Sutoro Eko, 2009). Tidak jauh berbeda, Anneli Milèn (2001) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individual, organisasi dan sistem untuk menjalankan dan mewujudkan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Kapasitas juga harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran dan hasil-hasil.

Kapasitas tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang statis, melainkan harus ditempatkan di dalam suatu konteks dinamis dengan kondisi-kondisi kerangka maupun perkembangan zaman yang berubah. Kabupaten Sinjai dikenal dengan potensi daerah yang menjanjikan. Selain penghasil berbagai komoditi di sektor perkebunan dan kehutanan, kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan ini juga memiliki tambang emas dan batubara yang belum diolah secara maksimal. Bila mendengar kata itu secara sepintas, orang bisa salah persepsi. Bisa jadi, yang terbayang adalah sebuah wilayah di Kepulauan Sumatera. Ini bisa dimaklumi. Pasalnya, di Sumatera Utara, tepatnya 22 Km dari Kota Medan terdapat Kota bernama Binjai. Padahal Sinjai bukanlah Binjai, keduanya terletak di lokasi yang berbeda. Binjai masuk dalam Provinsi Sumatera Utara, sementara Sinjai terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, keduanya memiliki potensi alam yang berbeda. Binjai merupakan kota jasa sementara Sinjai merupakan daerah yang kaya akan potensi alam. Sinjai tergolong wilayah dengan kekayaan alam berlimpah. Daerah dengan motto "Sinjai BERSATU" (Bersih, Elok, Rapi, Sehat, Aman, Tekun, Unggul) ini, memiliki potensi alam berupa pantai, pegunungan, hutan, dan perkebunan.

Kesemuanya menghasilkan hasil bumi yang menguntungkan. Melalui konsep tiga pilar pembangunan, Kabupaten Sinjai membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi para investor yang ingin berinvestasi. Dari sektor kelautan dan perikanan, Kabupaten Sinjai mempunyai potensi sumber daya yang memadai untuk dikelola. Di sepanjang pesisir pantai Sinjai seluas 31 km, produksi ikan yang bisa dicapai per hari mencapai 60 ton. Jenis ikan tangkapan nelayan pun beragam, seperti ikan kerapu, ikan cakalang, ikan sunu, ikan tuna, ikan layang, dan ikan bonito. Melimpahnya hasil tangkapan ikan di daerah Sinjai, tentu saja tak hanya dikonsumsi masyarakat Sinjai. Lebih dari 50 persen hasil tangkapan ikan, dikirim keluar daerah. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai, hasil tangkapan ikan tersebut dikirim ke Makasar. Yang menarik bila di daerah lain ikan didistribusikan pada siang hari, di Sinjai, umumnya para nelayan Sinjai yang jumlahnya mencapai sekitar 8 ribu orang dengan dukungan 1.242 kapal nelayan, mengirimkan hasil tangkapan sejak tengah malam hingga pagi hari.

Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Sinjai turut andil bagi perkembangan sektor kelautan. Instansi ini membuat rencana kerja strategis melalui pembudidayaan ikan dengan melakukan pembinaan kepada para nelayan, agar bisa meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan yang berorientasi bisnis air. Selain itu, meningkatkan pemberdayaan

**Oleh: Muhammad Takdir<sup>1</sup> & Jusniaty<sup>2</sup>**

masyarakat pesisir dan meningkatkan mutu hasil ekspor perikanan, para nelayan di Sinjai dibina untuk mengikuti kegiatan budi daya laut. Seperti budi daya ikan karang, ikan kerapu, dan rumput laut yang memberikan hasil cukup menggembirakan. Terkhusus pada rumput laut, dalam sebulan para nelayan di daerah ini bisa menghasilkan 250 ton rumput laut kering dengan harga tertinggi Rp 5.000 per kilogram. Ini merupakan salah-satu mata pencaharian yang cukup menjanjikan bagi nelayan di Kepulauan Sembilan di Kabupaten Sinjai. Inilah salah-satu program revitalisasi perikanan.

Dengan tingginya harga bahan bakar minyak yang berpengaruh terhadap kinerja nelayan, budidaya rumput laut ini bisa menjadi solusi. Bayangkan bisa suatu saat nanti ada pabrik agar-agar di Kabupaten Sinjai, sehingga produksi agar-agar bisa dibuat sendiri, bukan hanya menyediakan bahan bakunya saja akan tetapi lebih mengarah kepada produksi. Kapasitas pemerintah merupakan tantangan bagi para kepala desa untuk mengembang amanah dari masyarakat karena kepala desa merupakan pelaksana kebijakan pemerintah. Salah satu kewenangan kepalah desa adalah bagaimana meningkatkan prekonomian di desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, berdasarkan kebijakan kementrian desa tentang program pembagunan prioritas ditekankan pada potensi yang ada dimasing masing desa, apakah kepala desa mampu melakukan pembangunan sesuai dengan yang diprioritaskan hal ini membutuhkan sebuah tatakelola atau system pemerintahan yang baik lebih banyak melibatkan masyarakat.

Untuk mewujudkan program prioritas tentunya salahsatu hal yang harus dimiliki oleh pemerintah desa menurut Sutoro Eko (2005) yaitu “kapasitas regulasi bagaimana kemampuan dalam hal pengaturan, kapasitas ekstraksi bagaimana kemampuan mengarahkan, kapasitas distribusi bagaimana kemampuan membagi sumberdaya yang seimbang, kapsitas responsive bagaimana daya tanggap dan kapasitas jaringan yaitu bagaimana kemampuan membangun kerjasama dengan pihak lain”. Kapasitas pemerintah merupakan tantangan bagi para kepala desa untuk mengembang amanah dari masyarakat karena kepala desa merupakan pelaksana kebijakan pemerintah, salasatu kewenangan kepalah desa adalah bagaimana meningkatkan prekonomian di desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, berdasarkan kebijakan Kementrian Desa tentang program pembagunan prioritas ditekankan pada potensi yang ada dimasing masing desa, apakah kepala desa mampu melakukan pembangunan sesuai dengan yang diprioritaskan hal ini membutuhkan sebuah tatakelola atau sistem pemerintahan yang baik lebih banyak melibatkan masyarakat.

## **METODE**

Penelitian berlokasi di Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai sebagai wilayah pesisir. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini digunakan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan dan obserfasi terhadap obyek penelitian.

2. Menentukan subjek penelitian (informan) yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Para Kepala Desa atau, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat.
3. Pengumpulan, Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.
4. Pengolahan data, setelah data tersebut telah terkumpul kemudian dilakukan reduksi data yakni upaya memilih dan memilah data yang betul-betul relevan serta membuang data-data yang tidak diperlukan. Selanjutnya adalah melakukan penyajian data yang menarik sehingga mudah mencermatinya, serta memudahkan dalam menginterpretasikan data tersebut. Langkah terakhir yang dilakukan adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan.

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Fokus dalam penelitian ini adalah kemampuan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Sinjai yaitu di Kecamatan Tellu Limpoe dua desa dan Kecamatan Sinjai Timur 4 desa dan Kecamatan Pulau Sembilan 4 desa yang merupakan wilayah yang dekat dari bibir pantai/laut. Nama kecamatan dan desa sebagai wilayah pesisir di Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

Tabel. 1. Realisasi Anggaran Pembangunan Desa

No	Kecamatan	Nama Desa	Realisasi Anggaran Pembangunan Tahun 2018
1	Kecamatan Tellulimpoe	Desa Bua	Rp. 1.830.203.149,00
		Desa Patongko	Rp. 1.791.484.963,00
2	Kecamatan Sinjai Timur	Desa tongke-tongke	Rp. 1.788.880.311,00
		Desa Pasimarannu	Rp. 489.247.370,00
		Desa Panaikang	Rp. 1.689.744.250,00
		Desa Sanjai	Rp. 1.862.023.715,00
3	Kecamatan Pulau Sembilan	Desa Persatuan	Rp. 1.890.575.754,00
		Desa Pulau Harapan	Rp. 1.191.060.000,00

Sumber: Hasil olah data

Kekayaan alam berupa laut yang ada di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan merupakan potensi yang besar untuk memberikan kesajahteraan bagi masyarakat sekitarnya akan tetapi membutuhkan keterampilan untuk mengelolanya. Olehnya itu dengan adanya program pemerintah tentang pembangunan dipedesaan melalui program anggaran dana desa, maka seorang kepala desa dituntut untuk memanfaatkan nggaran tersebut yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berdasarkan pada potensi wilayah masing masing desa. Kemendes PDTT telah memprioritaskan empat program pembangunan pedesaan untuk tahun 2018 yakni Program Unggulan Kawasan Pedesaan

Oleh: **Muhammad Takdir<sup>1</sup> & Jusniaty<sup>2</sup>**

(Prukades), pembangunan embung, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan sarana olahraga desa.

Dalam penelitian ini teori yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengupas permasalahan tentang tata kelola pemerintahan desa yaitu Sutoro Eko tentang kemandirian desa. Menurut Sutoro Eko (2005), ada beberapa bentuk kemampuan (kapasitas) yang perlu dikembangkan desa dalam rangka membangun kemandirian desa.

### **1. Kapasitas Regulasi (mengatur)**

Kapasitas regulasi adalah kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. pengaturan bukan semata-mata bertujuan untuk mengambil sesuatu (melakukan pungutan), tetapi begitu banyak pengaturan yang berorientasi pada pembatasan kesewenang-wenangan., perlindungan, pelesatarian, pembagian sumberdaya (jabatan desa, kekayaan desa, pelayanan publik), pengembangan potensi desa, penyelesaian sengketa, dan seterusnya.

Sesuai dengan dokumen realisasi pembangunan di Kecamatan Tellulimpo tahun 2018 khususnya Desa Pattongko dan Desa Buah, kemampuan kepala desa dalam hal regulasi masi rendah, khususnya bagaimana membuat sebuah regulasi yang dapat mengembangkan potensi yang ada diwilayah desa. Salah satu contoh tentang aturan terhadap potensi desa yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa. Begitupula dengan 4 desa yang merupakan wilayah pesisir di Kecamatan Sinjai Timur, kepala desa hanya mampu melahirkan sebuah regulasi tentang pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan administrasi di kantor desa. Kecamatan Tellulimpo dan Kecamatan Sinjai Timur merupakan wilayah yang dekat dengan bibir pantai, tentunya salah satu potensi desa yang menarik untuk dikembangkan adalah destinasi wisata atau olahan hasil laut, Namun, sebagai langkah awal yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat setempat untuk berkontribusi dengan segala bentuk pembangunan yang ada di desa, dan didasarkan pada regulasi yang telah di buat bersama.

### **2. Kapasitas Ekstraksi**

Kapasitas ekstraksi adalah kemampuan mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat desa. Paling tidak, ada enam aset yang dimiliki desa: a) Aset fisik (kantor desa, balai dusun, jalan desa, sarana irigasi, dll); b) Aset alam (tanah, sawah, hutan, perkebunan, ladang, kolam, dll); c) Aset manusia (penduduk, SDM); d) Aset sosial (kerukunan warga, lembaga-lembaga sosial, gotong-royong, lumbung desa, arisan, dll); e) Aset keuangan (tanah kas desa, bantuan dari kabupaten, KUD, BUMDes dan; f) Aset politik (lembaga-lembaga desa, kepemimpinan, forum warga, BPD, rencana strategis desa, peraturan desa, dll).

Untuk meningkatkan kemampuan ekstraksi ini memang tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Yang jelas tidak semuanya padat modal, atau butuh dana besar. Umumnya langkah awal peningkatan kemampuan ekstraksi dimulai dengan analisis potensi desa (termasuk pemetaan tata ruang desa) yang kemudian dirumuskan menjadi rencana strategis desa. Berbicara tentang asset desa, dari sepuluh desa dari 3 kecamatan yang menjadi obyek penelitian ini dari 6 asset desa yang telah di jelaskan di atas, semua desa memiliki asset tersebut. Namun kelemahannya adalah kemampuan kepala desa untuk menentukan rencana strategis desa yang bisa untuk dikembangkan masih rendah. Hal ini juga di sebabkan karena kurangnya partisipasi dari semua kalangan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan desa. Setiap desa telah terbentuk BUMDES, namun tidak berjalan dengan baik, meskipun dalam perencanaan pembangun desa telah ditetapkan keterlibatan bumdes dalam sebagai lembaga desa yang bergerak dibidang usaha dan telah didukung dengan anggaran dan masih saja tidak bisa dijalankan dengan baik.

Untuk anggaran tahun 2018 kepala desa mempertimbangkan pembirian modal kepada BUMDES di sebabkan karena program kerja BUMDES untuk tahun tahun sebelumnya tidak mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Kegiatan bumdes untuk tahun tahun sebelumnya bergerak pada usaha simpan pinjam, namun program itu tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Disisi lain, pengelola BUMDES tidak serius dalam menjalankan programnya sehingga meskipun banyak modal yang diberikan untuk di keloat tidak menjamin keberhasilan BUMDES seperti yang ada di daerah lain.

### **3. Kapasitas Distributif**

Kapasitas distributif adalah kemampuan pemerintah desa membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Contoh yang paling nyata dalam hal ini adalah kemampuan pemerintah desa merancang APBDES, terutama dalam hal pengeluaran (alokasi). Umumnya pemerintah desa mempunyai kapasitas distributif yang masih sangat lemah, karena sebagian besar alokasi keuangan desa digunakan untuk belanja rutin perangkat desa, sementara dana pembangunan masih sangat minim. Sudah minim, itu pun lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik.

Untuk menciptakan sebuah desa yang mandiri tentunya dibutuhkan pendistribusian sumberdaya yang ada terutama anggaran dan sumber daya manusia. Melihat beberapa desa diwilayah pesisir Kabupaten Sinjai, pemerintah desa lebih banyak mengalokasikan penggunaan anggaran kepada pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, meskipun jalan memang merupakan sarana yang sangat dibutuhkan. Namun perlu juga mengalokasikan pembangunan berupa pengembangan sumber daya manusia untuk melahirkan sebuah inovasi dikalangan masyarakat. Hal yang dapat dilakukan adalah pembinaan kelompok tani, atau pembinaan ibu rumah tangga untuk menciptakan sesuatu kerajinan yang bernilai ekonomi yang dapat dijadikan sebagai

Oleh: **Muhammad Takdir<sup>1</sup> & Jusniaty<sup>2</sup>**

sumber penghasilan mereka, baik itu berupa makanan atau minuman atau kerajinan kerajinan tangan yang lain sesuai dengan potensi yang ada di masing masing desa.

#### **4. Kapasitas *Responsive***

Kapasitas responsif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa. Kemampuan ini harus dimiliki, sebab selama ini agenda perencanaan pembangunan desa cenderung berangkat dari kepentingan elite desa. Kemampuan untuk melihat bagaimana aspirasi atau kebutuhan masyarakat, tidak hanya dilihat dari apa yang dibutuhkan saat ini akan tetapi juga melihat apa yang dibutuhkan dimasa yang akan datang. Kebijakan pemerintah yang memberikan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD di setiap desa tidak selamanya ada. Olehnya itu, dibutuhkan kepekaan seorang kepala desa untuk memanfaatkan anggaran dana desa yang bersifat jangka panjang sebagai wujud pencapaian menuju desa yang mandiri. Program pembangunan yang prioritas yang telah ditetapkan oleh KEMENDES merupakan tahapan untuk mencapai desa yang mandiri.

Namun dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Sinjai dari tahun ke tahun hampir sama, maksud peneliti program pembangunan dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang 2018 programnya sama. Artinya, jika program pembangunan desa tahun lalu berupa pembangunan jalan untuk tahun depan masi ada program seperti itu dengan volume yang berbeda. Diantara 4 program prioritas pembangunan desa tahun 2018 yang ditetapkan oleh KEMENDES diantaranya produk unggulan, pembngunan embun untuk pertanian, pengembangan BUMDES, sarana olahraga. Hanya satu yang diprioritaskan oleh KEMENDES yang di implementasikan di desa yaitu sarana olahraga. Setiap desa di wilayah pesisir Kabupaten Sinjai telah memprogramkan pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga.

Untuk pembangunan embun sebagai wadah untuk menampung air untuk areal pertanian hanya satu desa yang telah melaksanakan pada tahun 2018 yaitu desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur, sumber anggaran DAK Tahun 2018. Jadi besar kecilnya anggaran yang telah dikelola oleh pemerintah desa untuk pembangunan tidak memberikan jaminan keberhasilan untuk mensejahtraakan masyarakatnya atau untuk menuju desa yang mandiri. Semakin besar anggaran yang di kololah oleh desa semakin besar pula potensi penyalahgunaannya, sebagaimana yang telah terjadi dikecamatan sinjai timur salah satu kepala desa sementara menjalani proses hukum karna penyalahgunaan anggaran dana desa. Hal itu memberikan gambaran bahwa kapasitas yang dimiliki oleh sebagian kepala desa dalam pengelolaan anggaran yang masih lemah.

#### **5. Kapasitas Jaringan**

Kapasitas jaringan adalah kemampuan pemerintah dan warga masyarakat desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas

ekstraktif. Menurut Tjokrowinoto (2001), bentuk-bentuk kemampuan yang relevan dengan kualitas pelaku pemberdayaan yakni:

- a. Kemampuan untuk melihat peluang-peluang yang ada;
- b. Kemampuan untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah yang dianggap prioritas dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan yang mempunyai potensi memberikan input dan sumber bagi proses pembangunan;
- c. Kemampuan menjual inovasi dan memperluas wilayah penerimaan program-program yang diperuntukkan bagi kaum miskin; dan
- d. Kemampuan memainkan peranan sebagai fasilitator atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh berkembang dengan kekuatan sendiri.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan ketrampilannya dalam mendesain pemberdayaan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 butir 8 disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Seperti telah disebutkan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai implikasi signifikan paradigma pembangunan pedesaan karena pada tataran normatif pembangunan pedesaan harus benar-benar memberdayakan masyarakat desa dan mengembangkan institusi pedesaan atau berpihak dan berpusat pada desa itu sendiri. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa harus ditempatkan sebagai prioritas utama dan pertama.

Dari beberapa sumber yang peneliti ketahui sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pembangunan desa merupakan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat atau peningkatan prekonomian masyarakat, namun dilihat dari laporan realisasi pelaksanaan pembangunan untuk desa di wilayah pesisir Kabupaten Sinjai, penggunaan anggaran untuk pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan sangat rendah di bandingkan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan di setiap desa. Anggaran untuk pembinaan serta pemberdayaan masyarakat kurang dari 100 juta pertahun, sedangkan untuk penyelenggaraan pemerintahan kisaran

Oleh: **Muhammad Takdir<sup>1</sup> & Jusniaty<sup>2</sup>**

± 500 juta pertahun di setiap desa dan selebihnya itu digunakan untuk program pembangunan fisik. Selanjutnya untuk menunjang keberhasilan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pemerintah desa perlu memiliki kemampuan untuk mencari *link* atau pasar untuk menjual produk produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang kepala desa dalam menjalankan aktifitas selaku penentu kebijakan di tingkat desa, hal ini merupakan esensi penting dalam penerapan pemerintahan di desa. Dalam hal pelaksanaan pembangunan khususnya pemanfaatan anggaran yang telah di gelontorkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau dari sumber penerimaan lain, tentunya peneliti melihat bagaimana kemampuan kepala desa dalam pemanfaatan anggaran, apakah berdasarkan dengan apa yang di prioritaskan oleh pemerintah sesuai dengan potensi desa masing-masing. Melihat potensi desa di tiga kecamatan yang merupakan wilayah pesisir Kabupaten Sinjai dan mensandingkan dengan program prioritas kementerian desa masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, diantaranya:

1. Bumdes, kemampuan pemerintah desa adalah membentuk badan usaha milik desa, dilihat dari beberapa aspek yang pertama melalui sebuah regulasi, aspek distribusi, aspek responsiv atau sifat peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat suda baik. Kehadiran BUMDES di setiap desa merupakan lembaga yang bisa menopang perekonomian yang ada didesa, dapat memberikan kontribusi kepada pelaksanaan pemerintahan dan juga dapat membantu masyarakat dalam menjalankan perekonomian mereka.
2. Produk Unggulan, wilyah pesisir memiliki potensi yang sangat banyak terutama dua desa di Kecamatan Tellulimpoe yang merupakan wiyah pesisir, dilihat dari letak geografisnya sumber penghasilan masyarakat pada umumnya ada dua sumber yaitu dari hasil laut dan pertanian, namun kemampuan pemerintah desa tak mampu mengembangkan produk unggulan yang lebih bernilai ekonomis. Kelemahan pemerintah desa adalah kurang peka terhadap apa yang menjadi sumber penghasilan masyarakat, tidak mampu melihat bagaimana peluang usaha sesuai dengan potensi desa masing masing.
3. Pembangunan Embun merupakan penampungan air dimaksudkan sebagai cara untuk mendorong produktivitas pertanian meningkat. Namun khusus untuk wilyah pesisir di Kabupaten Sinjai yang terdiri dari 10 desa, hanya satu desa yang memiliki potensi untuk pembangunan embun yaitu Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur, pemerintah desa juga telah mewujudkan program prioritas dan hal tersebut juga merupakan kebutuhan masyarakat Desa Sanjai dalam meningkatkan hasil pertanian.
4. Sarana olahraga merupakan hal yang sangat dibutuhkan, 100% pemerintah desa telah melaksanakan program prioritas ini dan memanfaatkan anggaran dana desa dengan efektif, baik berupa pemeliharaan sarana olah raga maupun bersifat pengembangan minat atau pembutan saran

olah raga yang baru.

5. Besar kecilnya anggaran yang di kelola di desa di setiap tahunnya tidak memberikan jaminan terwujudnya masyarakat yang sejahtera atau desa yang mandiri, sebab yang diprioritaskan setiap tahunnya adalah pembangunan fisik atau sarana dan prasarana desa

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anneli Milèn. 2001. *What Do We Know About Capacity Building? An Overview of existing knowledgr and good practice*. Geneva: Depar tment of Health Service Provision WHO.
- Suparjan & Suyatno, Hempri. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sutoro, Eko. 2005. *Memperkuat Kapasitas danKemandirian Desa*. Yogyakarta: IRE.
- Sutoro, Eko. 2005. *Pembaharuan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pmd Press.
- Tjokrowinoto, M. 2001. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.